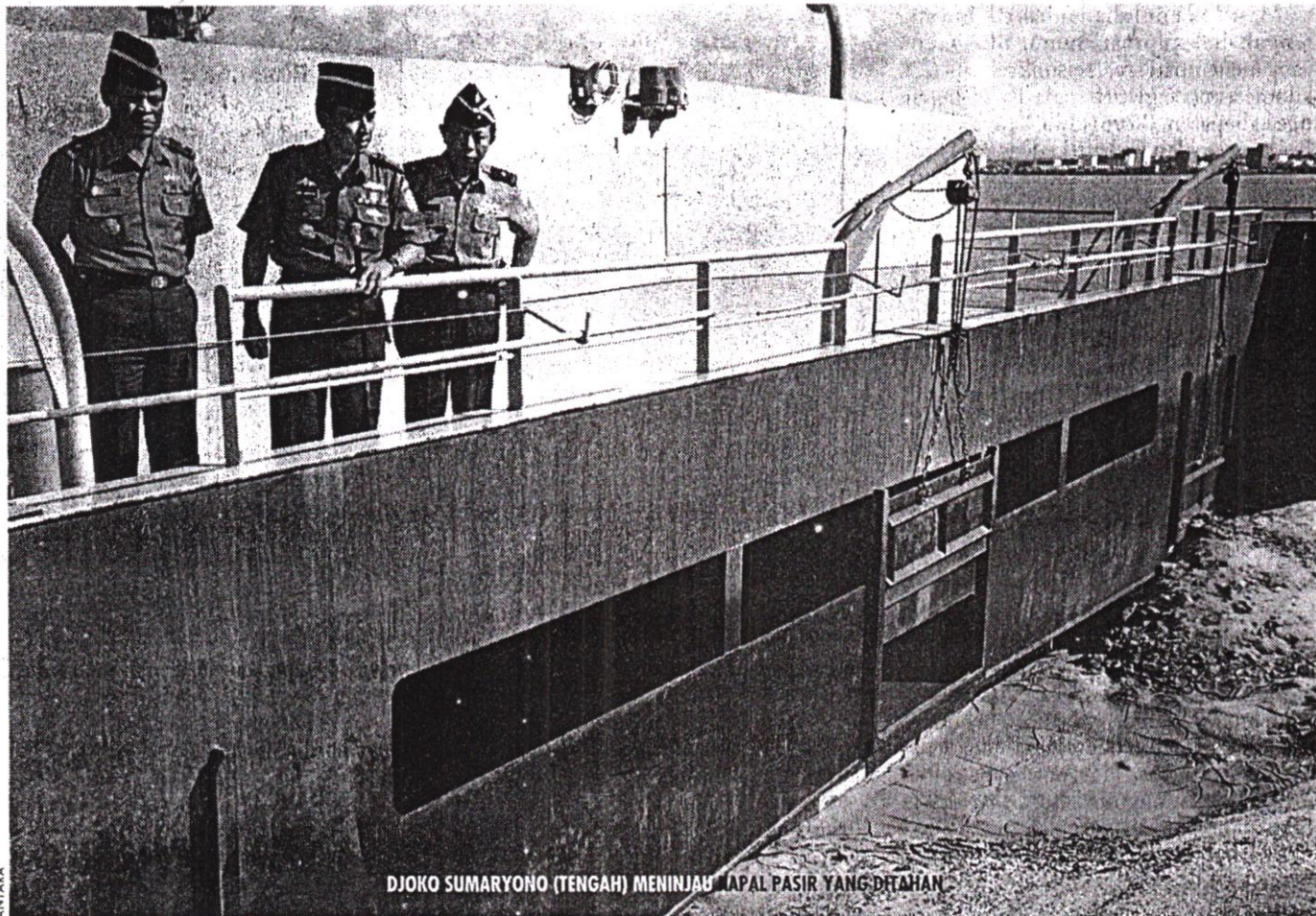


GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	GATRA	76	31-8-2002

EKONOMI | PASIR RIAU



DJOKO SUMARYONO (TENGAH) MENINJAU KAPAL PASIR YANG DITAHAN

Kuota Juragan Keruk

Ekspor pasir laut dibatasi. Untuk mendongkrak harga, sekaligus melestarikan lingkungan perairan Riau. Tapi, banyak yang perlu dibenahi.

PROFESSOR Gorjunov berjalan pelan diiringi Sigurot, Barakuda, dan Rondo. Mereka berangkat dari Batam menuju perairan Kabupaten Karimun, Riau, Rabu pekan lalu. Setibanya di tempat tujuan, para pengiring segera mengepung sang Professor. Gorjunov hanya berdiam diri, tak berkutik.

MV Professor Gorjunov, nama resmi kapal keruk berbendera Rusia itu, tak bisa banyak berulah. Ketiga pengiringnya tadi tak lain kapal perang TNI Angkatan Laut. Selain sang Professor, enam kapal keruk berbendera asing lain bernasib sama. Mereka lebih dulu digiring ke perairan Karimun.

Mereka semua tertangkap basah saat sedang asyik masuk mengeruk pasir laut di perairan Selat Durian dan Tanjung Uban,

Riau, tanpa dilengkapi surat sah, 25 Juli lalu. Kini, kapal keruk mereka digiring ke perairan Karimun (lihat: *SIM Kapal Pasir*).

Mereka dapat saja tetap beroperasi, tapi dengan "sistem pinjam pakai". "Pemiliknya dapat memakai kapal, tapi harus membayar uang jaminan yang besar," tutur Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan. Nasib Professor Gorjunov dan konco-konconya itu diputuskan dalam rapat pleno-Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L), yang dipimpin Rokhmin, Kamis petang pekan lalu.

Rapat tiga jam itu diadakan di Ruang Serba Guna, Departemen Kelautan dan Perikanan. Juga hadir Gubernur Riau, Saleh Djasit, dan para bupati. Tampak pula utusan Kejaksaan Agung, Departemen

men Kehakiman, dan Departemen Perhubungan. Dalam pertemuan itu, kapal keruk hanya menjadi "partai pembuka" perkara lebih gede: mengatur hiruk-pikuknya perniagaan pasir laut di "negeri segantang lada" itu.

Menurut Rokhmin, rapat TP4L kali ini bertujuan menentukan besaran kuota ekspor pasir laut. Setelah menghitung sana-sini, jajaran Rokhmin yakin, Singapura butuh pasokan pasir 107 juta meter kubik setahun untuk proyek reklamasinya. "Dari jumlah itu, dipatok kuota pasir 75% saja," kata Rokhmin kepada GATRA. Rincian kuota masing-masing daerah diserahkan kepada gubernur dan jajaran bupati. Daerah pantai sampai empat mil ke laut diatur bupati, wilayah selebihnya menjadi bagian gubernur.

Angka kuota itu, kata Rokhmin, dapat dihitung dari hasil bagi antara jatah masing-masing galian pasir dan jumlah seluruh wilayah tambang yang ada. "Hasilnya dikali dengan 75% kebutuhan pasir laut Singapura itu," kata Rokhmin lagi.

Kuota tiap daerah itulah yang nantinya dibagi-bagi lagi kepada para juragan pasir. Sampai di sini, aparat daerah mesti hati-

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

hati. "Banyak kriteria yang harus dipenuhi," kata Ferry Yachya, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Aparat daerah, menurut Ferry, harus jeli memperhatikan jumlah kuasa pertambangan, kuota wilayah, kapasitas tambang, serta berapa banyak kapal yang dimiliki sang juragan pasir.

Ferry pernah menerima laporan janggal. Suatu perusahaan diketahui memiliki daerah tambang berkapasitas 3 juta meter kubik pasir. Eh, nilai kontrak yang harus dipenuhinya mencapai 7 juta meter kubik. Mencurigakan. "Untuk memenuhi pesanan, ya, mencuri," ujar Ferry.

Semua kebijakan kuota ini tak lain untuk memenuhi ketentuan yang sebelumnya diajukan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Soewandi. Sehari sebelum pertemuan TP4L bersama para petinggi Riau itu, Rini menyatakan, volume ekspor pasir laut sampai Desember nanti dipatok 26 juta meter kubik.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan Sekretaris TP4L, Indroyono Soesilo. Jika target itu tercapai sebelum waktunya, bulan berikutnya tak boleh ada ekspor. Yang nekat ditangkap. "Biar lautnya tenang, bisa bernapas, begitu lho," kata anak buah Rokhmin yang sehari-hari menjabat Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan itu.

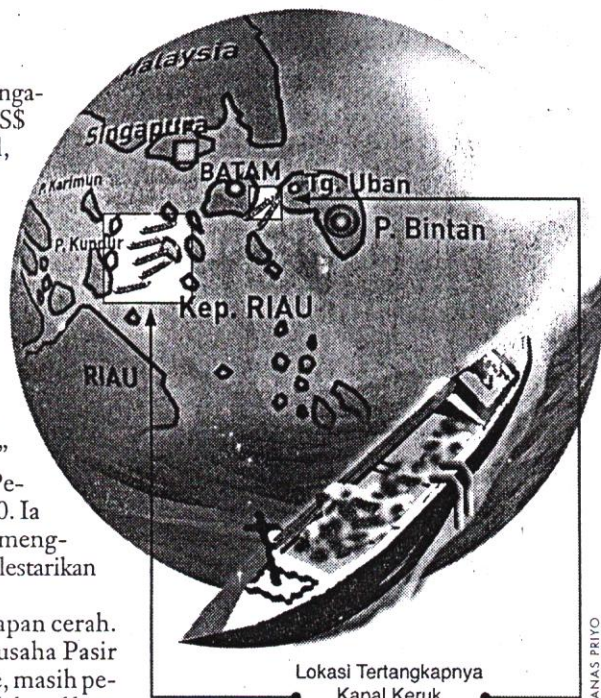
Pagar kuota ini, kata Indroyono, dimaksudkan agar harga pasir perlahan-lahan terdongkrak. Jebloknya harga pasir me-

ning memprihatinkan. Kini, Singapura membeli pasir Riau hanya S\$ 1,7 per meter kubik. Padahal, sebelumnya sempat mencapai S\$ 15-20 per meter kubik. Ini semua tak lepas dari riuhnya lalu lalang kapal penyedot pasir di perairan Riau.

Jika pasokan pasir ditahan sedikit, menurut Indroyono, bisa jadi Singapura kelaparan pasir. Harga pun bisa diatur. "Awalnya, akan dicoba mematok harga S\$ 3 per meter kubik," kata ahli pengindraan jauh itu. Pekan lalu, S\$ 1 berkisar Rp 5.500. Ia berharap, acuan harga itu bisa mengangkat harga pasir, sekaligus melestarikan lingkungan perairan Riau.

Toh, tak semua punya harapan cerah. Sekretaris Konsorsium Pengusaha Pasir Laut Batam, Abdoellah Gosse, masih pesimistis. Kasus diduduknya tujuh kapal berbendera asing tadi, kata Abdoellah, menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan tata niaga pasir Riau.

Kapal-kapal keruk itu enak saja bergentayangan karena merasa sudah membawa surat-surat lengkap. Ketika diperiksa aparat, ternyata dokumennya cuma fotokopi. Celakanya lagi, selama ini Pemerintah Provinsi Riau merestui berkas kopian itu. "Jadi, awak kapal merasa tak bersalah," kata Abdoellah. Ia berharap, pemerintah segera mengeluarkan rincian



rambu perdagangan pasir.

Kepada GATRA, Panglima Armada Barat TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Djoko Sumaryono, mengaku, selama ini tata niaga pasir laut memang masih amburadul. Pemerintah pusat dan daerah sering berselisih ketika mengatur sepak terjang para pengeruk pasir.

Buktinya, ya, soal surat fotokopi tadi. Hasil tangkapan anak buah Djoko jadi mentah. "Sering terpaksa dilepas karena dianggap mengantongi izin dari daerah," kata Djoko. Tapi, kini jajaran Djoko berpatokan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penambangan Pasir Laut, yang terbit Mei lalu. Hasilnya, tujuh kapal keruk asing tadi digelandang ke pengadilan.

Walau begitu, keampuhan Keppres 33 tersebut masih harus diuji. Soalnya, untuk menjaga beleid itu, tenaga keamanan yang ada masih minim. Ini memang memprihatinkan. Wakil Direktur Direktorat Polisi Air dan Udara, Komisaris Besar Adang Rochjana, pernah menghitung, jumlah kapal patroli yang dimiliki Polri dan TNI Angkatan Laut tak sebanding dengan luas wilayah perairan yang perlu diamankan.

Meski dihadapkan dengan berbagai kendala tadi, Rokhmin bertekad tetap berbenah. Sejak pekan lalu, ia melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan pengusaha pasir. "Acaranya cuma sosialisasi kuota, kok," katanya. Harapannya, "Professor" keruk tak seenaknya mengobok-obok laut Indonesia. ■

NUR HIDAYAT,
HENDRI FIRZANI, TATA HAIDAR RIZA,
KHOLIS BAHTIAR BAKRI, DAN NOVRIZAL (BATAM)